

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR : 21 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN STATUS AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN DAN PELAKSANA
UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
BAGI LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN (LPP)
TAHUN 2017

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 dan Pasal 9 dipandang perlu menetapkan pihak yang dapat bertindak sebagai Pelaksana Ujian;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 41 dipandang perlu menetapkan Akreditasi terhadap LPP PBJ;
 - c. bahwa dalam rangka menjamin kualitas Program Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelaksana Pelatihan maka perlu dilakukan akreditasi terhadap Lembaga Pelaksana Pelatihan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang penetapan status akreditasi Program Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Lembaga Pelaksana Pelatihan (LPP) Tahun 2017.
- Mengingat :
- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelatihan Pengadaan Barang Jasa;
- f. Berita Acara Rapat Pleno Akreditasi Nomor 07/BA/PA/D32/04/2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN DAN PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN (LPP) TAHUN 2017.**

KESATU : Penetapan Status Akreditasi Program Pelatihan dan Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi LPP PBJ sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : LPP PBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memperoleh sertifikat yang berlaku sesuai dengan peringkat akreditasinya;

KETIGA : LPP PBJ yang terbukti memberikan data yang tidak benar atau melanggar peraturan dapat diberikan sanksi;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 April 2017

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA



DHARMA NURSANI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN DAN PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN (LPP) TAHUN 2017.

NOMOR : 21 TAHUN 2017

TANGGAL : 7 APRIL 2017

**DAFTAR LPP PBJ
TERAKREDITASI PROGRAM PELATIHAN DAN PELAKSANA UJIAN
SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NO	NAMA LEMBAGA	KAB/KOTA PROVINSI	STATUS DAN PERINGKAT AKREDITASI	MASA BERLAKU
1.	Balai Diklat Keuangan Malang	Malang Jawa Timur	Terakreditasi A	7 April 2017 s/d 7 April 2022
2.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran Perbendaharaan Kementerian Keuangan	Bogor Jawa Barat	Terakreditasi A	7 April 2017 s/d 7 April 2022
3.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta	Jakarta Pusat DKI Jakarta	Terakreditasi A	7 April 2017 s/d 7 April 2022
4.	Balai Diklat Keuangan Medan	Medan Sumatera Utara	Terakreditasi A	7 April 2017 s/d 7 April 2022
5.	Balai Diklat Keuangan Balikpapan	Balikpapan Kalimantan Timur	Terakreditasi B	7 April 2017 s/d 7 April 2021
6.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Selatan	Banjarmasin Kalimantan Selatan	Terakreditasi B	7 April 2017 s/d 7 April 2021
7.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman	Purwokerto Jawa Tengah	Terakreditasi B	7 April 2017 s/d 7 April 2021
8.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Tanjung Jabung Timur Jambi	Terakreditasi C	7 April 2017 s/d 7 April 2020

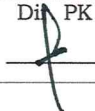
NO	NAMA LEMBAGA	KAB/KOTA PROVINSI	STATUS DAN PERINGKAT AKREDITASI	MASA BERLAKU
9.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta DIY	Terakreditasi C	7 April 2017 s/d 7 April 2020
10.	Balai Diklat Keagamaan Medan	Medan Sumatera Utara	Terakreditasi C	7 April 2017 s/d 7 April 2020

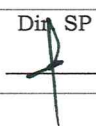
Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 7 April 2017

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
 PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nursani

DHARMA NURSANI

Paraf Koordinasi
Dit. PK 

Paraf Koordinasi
Dit. SP 

Paraf Koordinasi	
Deputi	
Direktur	
Kasubid	
Kasi	
Staf	

NO	NAMA LEMBAGA	KAB/KOTA PROVINSI	STATUS DAN PERINGKAT AKREDITASI	MASA BERLAKU
9.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta DIY	Terakreditasi C	7 April 2017 s/d 7 April 2020
10.	Balai Diklat Keagamaan Medan	Medan Sumatera Utara	Terakreditasi C	7 April 2017 s/d 7 April 2020

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 April 2017

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA



DHARMA NURSANI